



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
6. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan dinas untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dinas Tahun 2026.

8. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup dinas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun bertujuan untuk :

- a. pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
- b. pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan evaluasi hasil Renja Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (3) Memperhatikan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah menjaga kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026.

Pasal 6

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Tahun 2024;
 - c. BAB III Tujuan dan Sasaran;
 - d. BAB IV Rencana kerja dan Pendanaan; dan
 - e. BAB V Penutup.

- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah secara berkala setiap triwulan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang.
- (4) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis usulan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
 - c. Perubahan RKPD Tahun 2026; dan
 - d. hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Agustus 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada tanggal Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



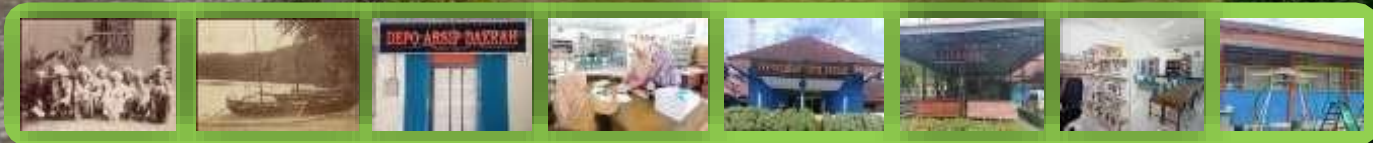
AWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR



DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR
SELATAN

**RENCANA
KERJA 2026**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 telah selesai disusun sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut.

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 tersebut, merupakan salah satu bagian dari dokumen rencana yang diwajibkan untuk disusun dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, program-program yang dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan rincian kegiatannya secara spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan indikator kinerja dan pencapaian kinerja.

Pada kesempatan ini, perlu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026, yang telah memberikan waktu, pikiran dan tenaga sehingga Renja ini dapat terselesaikan dengan baik. Kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan, dan semoga dokumen Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 ini dapat memberikan manfaat sebagaimana mestinya.

Kab. Pesisir Selatan, 8 Januari 2026
PLT KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	27
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	29
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	34
3.3 Program Dan Kegiatan	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	50
BAB V PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Tahun 2021	9
Tabel 2.2	Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15
Tabel 2.4	Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021	20
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Kecamatan dan Nagari ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	28
Tabel 3.1.1	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Perpusnas 2022-2024.....	29
Tabel 3.1.2	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Arsip Nasional Republik Indonesia 2022-2024	33
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan.....	36
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	38
Tabel 4.1	Rencana Program / Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pendanaan Indikatif	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan suatu wilayah, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Cakupan perencanaan pembangunan harus memperhatikan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik dokumen perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran

strategis untuk menyikapi isu–isu yang berkembang dan mengimplementasikan dalam program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah sebagai salah satu stakeholder kunci di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana, melalui penyusunan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah, yang kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah. Hal ini mengacu pada pasal 7 UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum.

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentng Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan/melaksanakan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025-2029;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang;
3. Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program prioritas tahunan daerah;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan.

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2026 disusun dengan sistematika sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi uraian tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Usulan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah, Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian tentang Telaah Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program Dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian tentang Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

BAB V. PENUTUP

Merupakan kesimpulan dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2026.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan target dan realisasi kinerja program dan kegiatan serta untuk menganalisis perencanaan kebutuhan pada tahun 2026, sangat dibutuhkan evaluasi Renja dengan cara melakukan perbandingan atau membuat sandingan data antara target capaian kinerja Renstra sesuai atau sampai dengan periode akhir Renstra, dibandingkan dengan data realisasi target dan realisasi kinerja hasil program dan kegiatan selama 2 (dua) tahun. Dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
 - 1.1. Program Pembinaan Perpustakaan dengan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan Layanan Perpustakaan elektronik dan kegiatan gemar membaca tingkat daerah Kab/Kota telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
 - 1.2. Program Pengelolaan Arsip dengan Kegiatan Pengelolaan arsip Dinamis Daerah Kab/Kota, Kegiatan Pengelolaan arsip Statis Daerah Kab/Kota dan kegiatan Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat Kab/Kota dapat mencapai target sesuai yang telah direncanakan.

Terkait hal tersebut diatas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan akan terus berupaya melakukan aksi nyata dengan menjadikan jam kerja pada hari libur dan memberikan dorongan kepada taman bacaan, pojok-pojok baca dan titik titik layanan untuk terus meningkatkan pelayanan begitupun juga dengan petugas atau pengelola kearsipan untuk terus menata arsip secara benar sesuai dengan kaidah kearsipan.

2. Realisasi Program Kegiatan yang telah memenuhi Target hasil/keluaran yang direncanakan.

2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Penyediaan Administarsi Pelaksanaan Tugas ASN
- d. Penyedia Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- e. Penyedia Bahan Logistik Kantor
- f. Penyedia Barang Cetak dan Pengadaan
- g. Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
- j. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- k. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional/ lapangan
- l. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- m. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel

2.1 di bawah ini :

Tabel. 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan
sampai dengan Tahun 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome) / (Output)	Target Kinerja Renstra PD pada Tahun 2026			Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi	
4	5	6			7		8	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		71		4.728.308.942	45	404.151.356	20	4.206.659.215
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	95		3.908.668.132	57	12.333.123.215	20,00	3.610.655.360
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya penunjang operasional Kantor	75	Laporan	10.000.000	45	88.380.984	15,00	14.750.000

Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang tersedia	75	Laporan	10.000.000	45	88.380.984	15,00	14.750.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya penunjang operasional Kantor	60	Bulan	3.202.508.942	36	8.926.989.992	12,00	3.112.794.569
Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Pembayaran Gaji, tunjangan dan tambahan Penghasilan	2100	OH	3.104.308.942	1.260	8.670.814.237	420,00	2.986.507.712
Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ketersediaan layanan Administrasi Keuangan	60	Bulan	98.200.000	36	256.175.755	12,00	126.286.857
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya penunjang operasional Kantor	60	Bulan	130.219.882	36	1.094.120.638	12,00	100.054.940
Sub. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	60	Bulan	8.898.882	36	337.002.162	12,00	6.905.873
Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ketersediaan Alat Tulis	60	Bulan	14.070.860	36	76.162.247	12,00	18.470.290
Sub. Kegiatan Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60	Bulan	7.185.140	36	61.059.359	12,00	8.966.778

Sub. Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Ketersediaan makan & minum tamu	60	Bulan	4.920.000	36	23.100.000	12,00	4.920.000
Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi & konsultasi SKPD	Ketersediaan Makan dan Minum Rapat serta perjalanan dinas	60	Bulan	95.145.000	36	596.796.870	12,00	60.791.999
	Ketersediaan Operasional rapat-rapat koordinasi konsultasi Dalam Daerah	60	Bulan		-			
	Ketersediaan Operasional rapat-rapat koordinasi konsultasi Dalam Daerah	60	Bulan		-			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya penunjang operasional Kantor	60	Bulan	340.900.000	36	1.462.322.213	12,00	250.499.992
Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Ketersediaan Air Listrik, dan Jasa Komunikasi	60	Bulan	154.800.000	36	395.137.529	12,00	144.499.992
Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor, Pramu Kantor dan Bahan/Alat Kebersihan	60	Bulan	186.100.000	36	449.963.550	12,00	106.000.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya penunjang operasional Kantor	60	Bulan	225.039.308	36	761.309.388	12,00	249.408.001
Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Terpeliharannya Kendaraan Dinas Operasional Kantor	6	5 roda 4 dan 1 sepeda motor	79.640.213	5	473.910.088	6,00	112.390.000
Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terpeliharannya Peralatan dan Mesin lainnya	60	Bulan	79.640.213	36	45.743.500	12,00	12.300.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharannya Gedung Kantor	60	Bulan	133.399.095	36	241.655.800	12,00	124.718.001
PROG. PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		4	naskah kuno	27.140.000			4,00	42.956.500
Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	sesuaikan permendagri	4	naskah kuno	27.140.000			4,00	42.956.500
Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	4	naskah kuno	27.140.000			4,00	42.956.500

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks budaya baca masyarakat	71		1.257.080.000	40	404.151.356	60,00	553.047.355
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Jumlah Sekolah yang memiliki Perpustakaan terakreditasi	40	Persen	328.495.600	24	240.629.572	12,00	553.047.355
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500					500,00	199.708.985
Sub. Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh Wilayah kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	80	Sekolah	64.451.700	65	140.503.196		0

Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	200	perpustakaan sekolah				200,00	46.630.000
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	11	unit komputer				11,00	3.100.000
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	100	Eksemplar	208.363.900			100,00	303.608.370
Sub. Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	200	titik layanan	55.680.000	160	100.126.376	25,00	

Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Jumlah Sekolah yang memiliki Perpustakaan terakreditasi	76	persen	300.044.400	45	163.521.784	15	374.461.190
Sub. Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	3350	Orang	112.559.587	2.010	123.923.984	1340	155.126.878
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	600	orang	187.484.813			600	164.484.791
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2	unit				1	34.100.000
Sub. Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	10	orang/kelompok		4	39.597.800	4,00	20.749.521
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		50		163.960.810	16	349.576.386	6	90.000.029
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	25		163.960.810	16	349.576.386	6,00	90.000.029
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah kabupaten/Kota	Presentase sapras arsip kondisi baik	50	persen	114.391.010	35	249.684.562	12,00	90.000.029
Sub. Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	55	15 nagari, 40 OPD	67.250.710	37	115.091.622	10,00	54.295.117
Sub. Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	55	15 kecamatan, 40 OPD	47.140.300	37	134.592.940	10,00	35.704.912
Pengelolaan Arsip Statis Daerah kabupaten/Kota	Presentase sapras arsip kondisi baik	25	OPD	24.277.200	17	67.955.874		
Sub. Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	25	OPD	24.277.200	17	67.955.874		
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Presentase sapras arsip kondisi baik	40	OPD	25.292.600	8	31.935.950		

Sub. Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	40	OPD	25.292.600	8	31.935.950		
--	---	----	-----	------------	---	------------	--	--

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi daerah. Untuk pelaksanaan otonomi daerah tersebut, terdapat urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada Daerah, yang selanjutnya menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan perpustakaan dan urusan kearsipan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan pelayanan dasar. Dalam kerangka urusan ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki tugas dan tanggungjawab yang setara dengan perangkat daerah yang masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya terus berupaya untuk memberikan kinerja pelayanan kepada masyarakat, aparatur, pihak-pihak lainnya yang memerlukan pelayanan perpustakaan maupun pelayanan kearsipan.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	Sasaran Strategis	SPM/stand ar nasional	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(thn n)	(thn n+1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3	Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan	50	50	32	48	48	50	
2	Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	19,80	20,80	18,48	18,12	20,60	7,5	
4	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	100	100	74	86	88	80	
			Nilai Kematangan Inovasi Daerah						92	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Kedudukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan katagorinya tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, telah ditetapkan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang pencapaiannya akan diukur berdasarkan indikator kinerja sasaran maupun indikator kinerja program. Kedudukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang jelas dalam pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten serta adanya Renstra tersebut, telah membuka peluang untuk melakukan perannya berkaitan dengan isu strategis bidang perpustakaan yaitu pemberdayaan perpustakaan dalam mencerdaskan masyarakat, dan bidang kearsipan yaitu arsip sebagai pilar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

b. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan

Dilihat dari kedudukan maupun kategori tipe C, saat ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan tengah menghadapi suatu kondisi lingkungan eksternal yaitu era globalisasi yang sangat cepat, tingkat ~~kegubernuran~~ ^{ketertarikan} informasi yang tinggi serta tuntutan pelayanan masyarakat yang cepat dan murah, sehingga sangat diperlukan pendekatan pengembangan organisasi yang mampu menyesuaikan dengan perubahan maupun perkembangan kondisi lingkungan eksternal.

Permasalahan umum yang muncul dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan saat ini adalah keterbatasan jumlah para pejabat fungsional yang difungsikan pada masing- masing bidang yang dipimpin oleh pejabat struktural, kondisinya belum merata. Akibat dari kondisi tersebut, tingkat pengendalian kinerja yang menjadi tanggungjawab para pejabat struktural menjadi kurang mencukupi dalam memicu akselerasi pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Permasalahan pelaksanaan program terkait Kearsipan adalah :

- Belum tertibnya implementasi penyusutan arsip oleh masing- masing perangkat daerah sebagai pencipta arsip sehingga penyelenggaraan kearsipan pemerintah daerah belum optimal;
- Keberadaan records centre sebagai tempat yang menjadi pusat penyimpanan arsip inaktif pada masing-masing perangkat daerah belum optimal sehingga masih sering terjadi arsip bertumpuk tidak tertib pada berbagai unit kerja;
- Apresiasi terhadap penelusuran dan penyelamatan arsip bernilai kesejarahan masih rendah;
- Perangkat daerah sebagai pencipta arsip belum mengadakan sarana dan prasarana kearsipa secara efektif;
- Pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap kearsipan masih rendah.

Permasalahan pelaksanaan program terkait Perpustakaan adalah :

- Pengadaan bahan perpustakaan belum optimal;
- Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Kebudayaan minat baca untuk usia dini belum optimal;
- Minat baca untuk usia dini belum maksimal
- Kegemaran membaca masyarakat belum optimal.

c. Peluang dan Tantangan Peningkatan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan

Page 15

Peluang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan Visi dan Misinya adalah :

- Peluang perpustakaan sangat berkaitan secara langsung dengan bidang pendidikan sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang mesti mendapatkan pelayanan secara optimal. Bidang pendidikan tentu akan berkembang maju apabila didukung oleh perpustakaan yang modern, dan dapat diandalkan. Indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diantaranya tingkat pendidikan yang berkualitas dengan unsur pendukungnya yaitu perpustakaan. Oleh karena itu penyelenggaraan perpustakaan dapat terus berkembang seiring dengan dinamika pengembangan pendidikan.

- Peluang kearsipan sebagai bahan utama yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Informasi yang berupa arsip tentu tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan data untuk perencanaan, pengawasan, dan pelaporan. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dapat terjadi apabila didukung oleh penyelenggaraan kearsipan yang tertib oleh masing- masing perangkat daerah sebagai pencipta arsip.

Sedangkan tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di masa yang akan datang adalah harus mampu menyelaraskan pelayanan kearsipan dan perpustakaan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, sehingga keberadaan teknologi tersebut mampu dimanfaatkan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026, dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4

Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/ (Output)	Target Kinerja Renstra PD pada Tahun 2026		Capaian Kine rja Renstra PD sampai denga n RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerj a dan Anggaran RKPD Tahun Berjala n (2025) yang Dievalua si		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)		Tingkat Capa ian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 20 23 (%)			
								I		II		III		IV								
4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100		
		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																						
URUSAN PEMERINTA HAN BIDANG PERPUSTAK AAN		71	1.766.34 1.466	45	404.151. 356	20	4.206.6 59.215	5,0 0	710.88 3.637	5,0 0	1.029.6 30.625	5,0 0	1.118.5 96.129	5	918.75 8.218	20,0 0	2.859.1 10.391	65,0 0	3.263.26 1.747	91, 55	77,57	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA H DAERAH	Persentas e ketercapaian penunjan g urusan pemerinta han daerah (%)	95		26.345.9 42.330	57	12.333.1 23.215	20, 00	3.610.6 55.360	5,0 0	710.88 3.637	5,0 0	1.029.6 30.625	5,0 0	1.118.5 96.129	5	918.75 8.218	20,0 0	3.777.8 68.609	77,0 0	16.110.9 91.824	81, 05	61,15
Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhi nya penunjan g operasion al Kantor	75	Laporan	162.760. 960	45	88.380.9 84	15, 00	14.750. 000	3,0 0	2.280. 000	3,0 0	2.720.0 00	5,0 0	3.900.0 00	4	5.740. 000	15,0 0	14.640. 000	60,0 0	103.020. 984	80, 00	63,30

Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang tersedia	75	laporan	162.760.960	45	88.380.984	15,00	14.750.000	3,00	2.280.000	3,00	2.720.000	5,00	3.900.000	4	5.740.000	15,00	14.640.000	60,00	103.020.984	80,00	63,30
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhi penunjang operasional Kantor	60	bulan	15.160.218.325	36	8.926.989.992	12,00	3.112.794.569	4,00	578.746.152	4,00	805.386.169	2,00	951.245.542	2	755.805.614	12,00	3.091.183.477	48,00	12.018.173.469	80,00	79,27
Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Pembayaran Gaji, tunjangan dan tambahan Penghasilan	2100	OH	14.769.588.885	1.260	8.670.814.237	420,00	2.986.507.712	105,00	562.161.926	120,00	768.228.922	100	920.261.770	95	715.252.110	420,00	2.965.904.728	1.680,00	11.636.718.965	80,00	78,79
Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ketersediaan layanan Administrasi Keuangan	60	bulan	390.629.440	36	256.175.755	12,00	126.286.857	4,00	16.584.226	4,00	37.157.247	2,00	30.983.772	2	40.553.504	12,00	125.278.749	48,00	381.454.504	80,00	97,65
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhi penunjang operasional Kantor	60	bulan	2.200.135.525	36	1.094.120.638	12,00	100.054.940	4,00	32.393.125	0,00	11.685.460	4,00	38.542.780	4	22.397.463	12,00	105.018.828	48,00	1.199.139.466	80,00	54,50
Sub. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	60	bulan	807.578.280	36	337.002.162	12,00	6.905.873	4,00	2.145.000	0,00	-	4,00	2.786.100	4	1.972.470	12,00	6.903.570	48,00	343.905.732	80,00	42,58
Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ketersediaan Alat Tulis	60	bulan	137.718.260	36	76.162.247	12,00	18.470.290	4,00	8.419.100	0,00	-	4,00	10.019.012	4	5.112.993	12,00	23.551.105	48,00	99.713.352	80,00	72,40
Sub. Kegiatan Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60	bulan	112.817.485	36	61.059.359	12,00	8.966.778	4,00	3.191.625	0,00	-	4,00	2.057.118	4	3.700.700	12,00	8.949.443	48,00	70.008.802	80,00	62,05

Sub. Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Ketersediaan makan & minum tamu	60	bulan	38.500.000	36	23.100.000	12,00	4.920.000	4,00	943.000	0,00		8,00	3.939.000	-	-	12,00	4.882.000	48,00	27.982.000	80,00	72,68	
Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi & konsultasi SKPD	Ketersediaan Makan dan Minum Rapat serta perjalanan dinas	60	bulan	1.103.521.500	36	596.796.870	12,00	60.791.999	4,00	17.694.400	3,00	11.685.460	2,00	19.741.550	3	11.611.300	12,00	60.732.710	48,00	657.529.580	80,00	59,58	
	Ketersediaan Operasional rapat-rapat koordinasi konsultasi Dalam Daerah	60	bulan		-														0,00		0,00		0,00
	Ketersediaan Operasional rapat-rapat koordinasi konsultasi Dalam Daerah	60	bulan		-														0,00		0,00		0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya penunjang operasional Kantor	60	bulan	7.715.264.175	36	1.462.322.213	12,00	250.499.992	4,00	49.050.824	4,00	54.497.297	2,00	58.400.128	2	68.247.241	12,00	230.195.490	48,00	1.692.517.703	80,00	21,94	
Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Ketersediaan Air Listrik, dan Jasa Komunikasi	60	bulan	658.143.960	36	395.137.529	12,00	144.499.992	4,00	33.050.824	4,00	27.497.297	2,00	31.400.128	2	40.247.241	12,00	132.195.490	48,00	527.333.019	80,00	80,12	
Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor, Pramu Kantor dan Bahan/Ala	60	bulan	884.908.875	36	449.963.550	12,00	106.000.000	4,00	16.000.000	4,00	27.000.000	2,00	27.000.000	2	28.000.000	12,00	98.000.000	48,00	547.963.550	80,00	61,92	

	t Kebersihan																					
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhi penunjang operasional Kantor	60	bulan	1.107.563.345	36	761.309.388	12,00	249.408.001	4,00	45.313.536	4,00	71.009.499	2,00	66.507.679	2	66.567.900	12,00	249.398.614	48,00	1.010.708.002	80,00	91,26
Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Kantor	6	5 roda 4 dan 1 sepeda motor	822.502.595	5	473.910.088	6,00	112.390.000	2,00	26.163.536	1,00	25.782.499	2,00	37.032.679	1	23.401.900	6,00	112.380.614	11,00	586.290.702	83,33	71,28
Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin lainnya	60	bulan	73.733.750	36	45.743.500	12,00	12.300.000	4,00	3.150.000	3,00	1.625.000	2,00	5.475.000	3	2.050.000	12,00	12.300.000	48,00	58.043.500	80,00	78,72
Pemeliharaan/R rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	60	bulan	211.327.000	36	241.655.800	12,00	124.718.001	4,00	16.000.000	3,00	43.602.000	2,00	24.000.000	3	41.116.000	12,00	124.718.000	48,00	366.373.800	80,00	173,37
PROG. PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		4	naskah kuno	4			4,00	42.956.500		0	0,00	-			1	2.792.000	1,00	2.792.000	1,00	2.792.000	25,00	6980000,00
Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	sesuaikan permendagri	4	naskah kuno	4			4,00	42.956.500	1,00	0	0,00	-			1	2.792.000	2,00		2,00	0	50,00	0,00

Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	4	naskah kuno	42.956.500			4,00	42.956.500	1,00	0	0,00	-		-	1	2.792.000	2,00				0,00	0,00
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks budaya baca masyarakat	71		1.766.341.466	40	404.151.356	60,00	553.047.355	15,00	3.100.000	15,00	84.332.200	15,00	396.402.939	15	197.302.367	60,00	681.137.506	99,80	1.085.288.862	140,56	61,44
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Jumlah Sekolah yang memiliki Perpustakaan terakreditasi	40	persen	717.756.675	24	240.629.572	12,00	553.047.355	4,00	3.100.000	3,00	17.115.000	3,00	346.737.535	2	79.091.710	12,00	446.044.245	36,00	686.673.817	90,00	95,67
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500		207.999.918			500,00	199.708.985		0	0,00	-	500	190.551.770	-	5.700.000	500,00	196.251.770	500,00	196.251.770	100,00	94,35

Sub. Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh Wilayah kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	80	sekolah	249.948.365	65	140.503.196		0	0,00	0	0,00						0,00	0	65,00	140.503.196	81,25	56,21
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	200	perpustakaan sekolah	3.100.000			200,00	46.630.000	0,00	0	0,00		200	40.532.200	-	-			0,00	0	0,00	0,00
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	11	unit komputer	3.100.000			11,00	3.100.000	11,00	3.100.000	0,00	-	-	-	-	-			0,00	0	0,00	0,00

Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten /Kota yang Dikembangkan	100	eksemplar	303.608.370			100,00	303.608.370	25,00	0	30,00	17.115.000	20,00	115.653.565	25	73.391.710			0,00	0	0,00	0,00
Sub. Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten /Kota Melalui Peningkatan Koleksi	200	titik layanan	157.999.940	160	100.126.376	25,00		0,00	0	0,00			-			0,00	0	160,00	100.126.376	80,00	63,37
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Jumlah Sekolah yang memiliki Perpustakaan terakreditasi	76	persen	1.048.584.791	45	163.521.784	15	374.461.190	4,00	0	4,00	67.217.200	3,00	49.665.404	4	118.210.657	15,00	235.093.261	60,40	398.615.045	79,47	38,01
Sub. Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	3350	Orang	350.000.000	2,010	123.923.984	1340	155.126.878	335,00	0	300,00	36.046.000	300	3.029.523	405	70.625.200	1340,00	109.700.723	3,350,00	233.624.707	100,00	66,75

Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapat kan Pengharga an Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	600	orang	164.484.791			600	164.484.791		0	100,00	14.171.200	200	29.540.881	300	35.185.457	600,00	78.897.538	600,00	78.897.538	100,00	47,97
	Jumlah sarana Perpustaka an yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenang an Daerah Kabupaten /Kota	2	unit	334.100.000			1	34.100.000	0,00	0	0,25	17.000.000	0,50	17.095.000	0,25	-	0,75	34.095.000	0,75	34.095.000	37,50	10,21
Sub. Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustaka an Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten /Kota yang Dikemban gkan	10	orang/kelompok	200.000.000	4	39.597.800	4,00	20.749.521		0	0,00	-	-	-	4	12.400.000	4,00	12.400.000	8,00	51.997.800	80,00	26,00
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																						

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		50		27.181.49.075	16	349.576.386	6	90.000.029	2	17.608.800	1	27.839.744	1,00	23.313.590	2	4.430.000	6	73.192.134	22,00	422.768.520	88	51
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	25		835.506.745	16	349.576.386	6,00	90.000.029	2,00	17.608.800	1,00	27.839.744	1,00	23.313.590	2	4.430.000	6,00	73.192.134	22,00	422.768.520	88,00	50,60
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah kabupaten/Kota	Presentase sapras arsip kondisi baik	50	persen	459.504.205	35	249.684.562	12,00	90.000.029	4,00	17.608.800	3,00	27.839.744	3,00	23.313.590	2	4.430.000	12,00	73.192.134	47,00	322.876.696	94,00	70,27
Sub. Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	55	15 nagari, 40 OPD	213.013.955	37	115.091.622	10,00	54.295.117	3,00	17.608.800	2,00	13.536.410	1,00	3.030.090	4	4.040.000	10,00	38.215.300	47,00	153.306.922	85,45	71,97
Sub. Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten /Kota	55	15 kecamatan, 40 OPD	246.490.250	37	134.592.940	10,00	35.704.912		0	4,00	14.303.334	2,00	20.283.500	4	390.000	10,00	34.976.834	47,00	169.569.774	85,45	68,79
Pengelolaan Arsip Statis Daerah kabupaten/Kota	Presentase sapras arsip kondisi baik	25	OPD	197.310.120	17	67.955.874											0,00	0	17,00	67.955.874	68,00	34,44
Sub. Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan,	25	OPD	197.310.120	17	67.955.874					0,00						0,00	0	17,00	67.955.874	68,00	34,44

	Preservasi dan Akses Arsip Statis																				
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Presentase sapras arsip kondisi baik	40	OPD	178.692.420	8	31.935.950										0,00	0	8,00	31.935.950	20,00	17,87
Sub. Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Melalui JIKN	40	OPD	178.692.420	8	31.935.950										0,00	0	8,00	31.935.950	20,00	17,87

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan berdasarkan usulan yang diperoleh dari pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Bidang Perpustakaan dan Kearsipan tidak ada (Nihil) yang tergambar pada tabel 2.5 di bawah ini :

Tabel 2.5

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI KECAMATAN DAN NAGARI KE
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026**

NO	PROGRAM/KE GIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
			<i>N I H I L</i>		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dilakukan berdasarkan Renstra Perpustakaan Nasional (Perpusnas) 2025-2029, dapat dilihat pada Tabel 3.1.1 di bawah ini:

Tabel 3.1.1

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Perpusnas 2025-2029

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Program dan Kegiatan
1.	Penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas dengan pemanfaatan perpustakaan bagi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, ditandai dengan meningkatnya nilai budaya literasi dari 55,03 (Baseline 2019 2019) menjadi 71,0 tahun 2024.	1. Terwujudnya pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat 2. Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan dan Berbasis Inklusi Sosial untuk memperkuat Budaya Literasi 3. Terwujudnya Layanan Prima, Pelestarian, Pengembangan dan Pemamfaatan Bahan Perpustakaan dan Naskah Nusantara 4. Terwujudnya Tata kelola dan Manajemen Perpustakaan yang Baik dan Handal	A. Program Perpustakaan dan literasi terdiri dari Kegiatan : 1. Jasa Informasi Perpustakaan dan pengelolaan Naskah Nusantara 2. Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan 3. Pembinaan Perpustakaan 4. Preservasi dan alih media bahan perpustakaan 5. Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan 6. Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan 7. Pengolahan Data dan Informasi 8. Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan 9. Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus

		5. Pengembangan dan Pembinaan semua Jenis Perpustakaan 6. Tersedianya Kebijakan dan Pengkajian perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca dan literasi 7. Peningkatan Tenaga Perpustakaan yang Kompeten dan Propesional 8. Peningkatan Koleksi Nasional Deposit dan Bibliografi serta pengioahan Bahan Perpustakaan yang lengkap dan Muktahir 9. Peningkatan Layanan perpustakaan pelestarian dan alih media bahan Perpustakaan dan Naskah Nusantara/Kuno 10. Penguatan Sistem Informasi Perpustakaan yang terpadu 11. Terselenggaranya Pengawasan Internal Perpusnas yang efektif dan efisien 12. Terwujudnya Aparat Sipil Negara dan Ketatausahaan	10. Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi 11. Analisis Perpustakaan,Pengembangan Budaya Baca dan Literasi 12. Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno dan. 13. Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta
--	--	--	--

		PERPUSNAS yang Propesional 13. Terwujudnya Pelayanan Hukum,kemitraan,terlaks na Organisasi yang berkualitas 14. Terwujudnya Perencanaan yang Transparan dan Akuntabel 15. Terlaksananya Layanan Keuangan Sesuai Standar	
--	--	---	--

2.	Mendorong perkembangan semua jenis perpustakaan sesuai standar dalam mendukung pembelajaran sepanjang hayat		B. Program Dukungan Manajemen terdiri dari kegiatan : 1. Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional 2. Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Perpustakaan Nasional 3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Umum Perpustakaan Nasional 4. Pengawasan Intern Perpustakaan Nasional 5. Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Karno dan; 6. Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta
----	---	--	--

Selanjutnya berdasarkan Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 3.1.2 di bawah ini :

Tabel 3.1.2
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Arsip Nasional Republik Indonesia 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Program dan Kegiatan
1.	Meningkatnya pemanfaatan arsip untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan ketahanan budaya bangsa yang tangguh.	-Meningkatnya Kepatuhan Publik terhadap kebijakan kearsipan. -Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terperaya seara nasional. -Meningkatnya pelayanan informasi arsip yang prima. -Terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI.	A. Program Dukungan manajemen 1. Kegiatan. - Pelayanan organisasi kepegawaian dan hukum. - Pelayanan perencanaan pemantauan dan evaluasi kerjasama, humas dan tata usaha pimpinan. - Pengawasan internal. - Pelayanan Umum B. Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional. 1. Kegiatan. - pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan. - Pembinaan kearsipan lingkup pusat. - Pembinaan kearsipan lingkup daerah wilayah timur. - Pembinaan kearsipan lingkup wilaya barat. - Pengembangan dan sertifikasi SDM Kearsipan.
2.	Terwujudnya tertib arsip statis yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional		
3.	Terwujudnya penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan Nasional		
4.	Terwujudnya manajemen internal dan yang profesional dalam rangka mendukung tugas penyelenggaraan kearsipan nasional		

			- Pelayanan jasa kearsipan. - Pelayanan pendidikan dan pelatihan kearsipan. - Pengawasan dan akreditasi kearsipan. - Akuisisi arsip nasional - Pengolahan arsip Nasional - preservasi arsip nasional. - Pengolahan arsip tsunami dan arsip statis di daerah. - Pelayanan dan pemanfaatan arsip. - Penyelenggaraan sistim dan jaringan informasi. - Pengelolaan data dan informasi kearsipan.
--	--	--	---

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah :

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 – 5 tahun, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang dapat dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Fokus utama sasaran adalah tindakan alokasi, distribusi dan pemanfaatan sumber daya yang mengarah pada hasil nyata.

1. Tujuan

Tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

Tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan
Terwujudnya tata kelola kearsipan yang akuntabel dan meningkat nya budaya literasi masyarakat.

2. Sasaran

Sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Renstra Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- b. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah
- c. Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan.
- d. Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat

Secara umum dapat dilihat Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2

INDIKATOR KINERJA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN								
2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	84,42	87	7,5	8	8,5	9	9,5
3.	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	48	50	50	55	55	55	60
4.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	77,39	80	80	80	85	85	87
5.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	77,67	80	81	82	83	84	85
6.	Nilai Kematangan Inovasi Daerah	Angka	88	90	92	93	94	95	96

3.3. Program Dan Kegiatan

Sejalan dengan tujuan dan sasaran di atas, maka untuk mengoperasionalkanya dilaksanakan oleh 4 (empat) program 12 (dua belas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan. Jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksnakan program dan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 4.572.326.793,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus s e m b i l a n puluh tiga rupiah) untuk tahun 2026.

Rincian lebih jelas dari program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan kebutuhan pendanaan beserta sumbernya, dapat dilihat pada tabel Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini .

Tabel 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	IKU/IKD/IKK	Kode Rekening	Prog/keg/sub keg	Indikator		Rencana Anggaran di Renstra									
						2026		2027		2028		2029		2030	
						Target	Anggaran	Targe t	Renja	Targe t	Renja	Targe t	Renja	Target	Renja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	- 0				
							4.728.308.942		4.728.308.942		5.908.456.298		5.922.907.873		6.288.980.298
		X XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				3.908.668.132		4.194.308.942		4.277.815.488		4.355.842.171		4.522.842.171
	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			81	3.908.668.132	82	4.194.308.942	83	4.277.815.488	84	4.355.842.171	85	4.522.842.171
	2. Nilai Kematangan Inovasi Daerah					92		93		94		95		96	
		X XX 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			28		30		30		30		30	

		X XX 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	2		2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000
		X XX 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	10	2		2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000
		X XX 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	10	2		2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000
		X XX 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	10	2		2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000
		X XX 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	10	2		2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000
		X XX 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian KinerjadanIkhtisarR ealisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan LaporanCapaianKin erjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	4		4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000

		X XX 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70	14	10.000.000	14	10.000.000	14	10.000.000	14	10.000.000	14	10.000.000
		X XX 01 2.01 0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4			1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
		X XX 01 2.01 0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4			1	6.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
		X XX 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
		X XX 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	189	24	3.104.308.942	30	3.104.308.942	40	3.104.308.942	45	3.104.308.942	50	3.104.308.942
		X XX 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	12	98.200.000	12	98.200.000	12	98.200.000	12	97.226.683	12	97.226.683
		X XX 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48			12	700.000	12	700.000	12	700.000	12	700.000
		X XX 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	20			5	500.000	5	500.000	5	500.000	5	500.000

				Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
		X XX 01 2.02 0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	20			5	500.000	5	500.000	5	500.000	5	500.000
		X XX 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	48			12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000
		X XX 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						-						
		X XX 01 2.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							4	10.000.000	4	10.000.000	
		X XX 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						4	2.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000
		X XX 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
		X XX 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24						12	10.000.000	12	10.000.000	

		X XX 01 2.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	48			12	400.000	12	400.000	12	400.000	12	400.000
		X XX 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8			2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000
		X XX 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	2							1	10.000.000	1	10.000.000
		X XX 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												
		X XX 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	1	8.898.882	1	8.898.882	1	8.898.882	1	8.898.882	1	8.898.882
		X XX 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4			1	50.000.000	1	58.049.165	1	58.049.165	1	58.049.165
		X XX 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2							1	15.000.000	1	15.000.000
		X XX 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	1	14.070.860	1	14.070.860	1	14.070.860	1	14.070.860	1	14.070.860
		X XX 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	1	7.185.140	1	7.185.140	1	7.185.140	1	7.185.140	1	7.185.140

		X XX 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4							2	15.000.000	2	15.000.000
		X XX 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	12	4.920.000	12	4.920.000	12	4.920.000	12	4.920.000	12	4.920.000
		X XX 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	12	95.145.000	12	95.145.000	12	95.145.000	12	95.145.000	12	95.145.000
		X XX 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	48			12	3.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000
		X XX 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	48			12	7.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000
		X XX 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
		X XX 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3			1	15.000.000			1	5.000.000	1	5.000.000
		X XX 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3			1	5.000.000			1	5.000.000	1	5.000.000
		X XX 01 2.07 0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4			1	30.000.000	1	47.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000

		X XX 01 2.07 0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2						1	5.000.000	1	5.000.000
		X XX 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
		X XX 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	154.800.000	12	180.000.000	12	200.800.000	12	200.800.000	200.800.000
		X XX 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2						1	2.000.000	1	2.000.000
		X XX 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	12	186.100.000	12	186.100.000	12	186.100.000	12	186.100.000	186.100.000
		X XX 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
		X XX 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4			1	39.190.000	1	39.190.000	1	39.190.000	39.190.000
		X XX 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	6	79.640.213	6	102.300.000	6	102.300.000	6	102.300.000	102.300.000

		X XX 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2				1	2.000.000			1	10.000.000
		X XX 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150	30	12.000.000	30	12.000.000	30	12.000.000	30	12.000.000	12.000.000
		X XX 01 2.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2				1	2.000.000			1	2.000.000
		X XX 01 2.09 0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2				1	2.000.000			1	2.000.000
		X XX 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	JumlahGedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi	5	1	133.399.095	1	134.890.118	1	198.047.499	1	198.047.499	298.047.499
		X XX 01 2.13	Penataan Organisasi											
		X XX 01 2.13 0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2						1	2.000.000	1	5.000.000
		X XX 01 2.13 0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	JumlahDokumenM onitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4			1	2.500.000	1	500.000	1	500.000	500.000
		X XX 01 2.13 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	JumlahDokumenKo ordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4			1	7.500.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5.000.000

	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			80	655.680.000	80	219.500.000	85	1.014.680.000	85	953.104.892	87	1.097.177.317
	'Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat					7,5		8		8,5		9		9,5	
		2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				628.540.000		189.500.000		962.540.000		900.964.892		985.037.317
		2 23 02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
		2 23 02 2.01 0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan'	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	25	5	64.451.700	5	20.000.000	5	64.451.700	5	64.451.700	5	64.451.700
		2 23 02 2.01 0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	20			5	15.000.000	5	150.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000
		2 23 02 2.01 0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui	25	5	55.680.000	5	15.000.000	5	55.680.000	5	55.680.000	5	55.680.000

				peningkatan koleksi											
		2 23 02 2.01 0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	4			1		1		1		1	
		2 23 02 2.01 0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	110			80	7.500.000	90	25.000.000	100	25.000.000	110	25.000.000
		2 23 02 2.01 0015	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	4			1	8.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000
		2 23 02 2.01 0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12			3	5.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000
		2 23 02 2.01 0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	4			1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
		2 23 02 2.01 0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	4			1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000

		2 23 02 2.01 0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5	1	208.363.900	1	15.000.000	1	208.363.900	1	250.000.000	1	250.000.000
		2 23 02 2.01 0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	4			1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000
		2 23 02 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
		2 23 02 2.02 0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat/ Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	4			1	15.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
		2 23 02 2.02 0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	1			1	15.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000
		2 23 02 2.02 0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4			1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
		2 23 02 2.02 0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	15	3	187.484.813	3	15.000.000	3	187.484.813	3	157.484.813	3	177.484.813

		2 23 02 2.02 0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	250	50	112.559.587	50	25.000.000	50	112.559.587	50	114.348.379	50	114.348.379
		2 23 02 3.03	Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat												
		2 23 02 3.03 0001	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	3					1	25.000.000	1	25.000.000	1	89.072.425
		2 23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				27.140.000		30.000.000		52.140.000		52.140.000		112.140.000
		2 23 03 2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota												
		2 23 03 2.01 0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	5	1	27.140.000	1	15.000.000	1	27.140.000	1	27.140.000	1	67.140.000
		2 23 03 2.01 0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalih mediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	4			1	15.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000

		2 23 03 2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
		2 23 03 2.02 0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan DaerahTingkat Kabupaten/Kota	1									1	10.000.000
		2 23 03 2.02 0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh PerpustakaanDaerah Tingkat Kabupaten/Kota	1									1	10.000.000
	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			50	163.960.810	55	314.500.000	55	615.960.810	55	613.960.810	60	668.960.810
		2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				163.960.810		260.500.000		546.960.810		546.960.810		546.960.810
		2 24 02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
		2 24 02 2.01 0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	50	10	67.250.710	10	54.000.000	10	67.250.710	10	67.250.710	10	67.250.710

		2 24 02 2.01 0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang DilakukanPemeliha raan dan Penyusutan	600			150	25.000.000	150	25.000.000	150	25.000.000	150	25.000.000
		2 24 02 2.01 0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	200	30	47.140.300	35	47.500.000	40	47.140.300	45	47.140.300	50	47.140.300
		2 24 02 2.01 0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	4			1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
		2 24 02 2.01 0005	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	104			26	10.000.000	26	15.000.000	26	15.000.000	26	15.000.000
		2 24 02 2.01 0006	Penyusunan Database Arsiparis	Jumlah arsiparis	5	1		1		1		1		1	
		2 24 02 2.01 0007	Pemilihan Arsiparis Teladan	Jumlah Arsiparis yang dipilih dan didukung kegiatannya Arsiparis Teladan	4			1	15.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
		2 24 02 2.01 0008	Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	4			1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000
		2 24 02 2.01 0009	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan	4			1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000

		2 24 02 2.01 0010	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	104			26	10.000.000	26	20.000.000	26	20.000.000	26	20.000.000
		2 24 02 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota												
		2 24 02 2.02 0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	4			1	5.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
		2 24 02 2.02 0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip	4			1	2.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
		2 24 02 2.02 0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	14	10	24.277.200	1	2.000.000	1	24.277.200	1	24.277.200	1	24.277.200
		2 24 02 2.02 0005	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Jumlah Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	4			1	5.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
		2 24 02 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota												

		2 24 02 2.03 0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	18	10	25.292.600	2	15.000.000	2	25.292.600	2	25.292.600	2	25.292.600
		2 24 02 2.03 0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	4			1	20.000.000	1	24.000.000	1	24.000.000	1	24.000.000
		2 24 02 3.04	Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota												
		2 24 02 3.04 0001	Pelaksanaan Bimbingan Teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota	Jumlah Bimbingan Teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota yang dilaksanakan	3					1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000
		2 24 02 3.04 0002	Pelaksanaan Pembinaan kearsipan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, dan Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi yang dilakukan pembinaan	3					1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
		2 24 02 3.06	Pengawasan kearsipan di kabupaten/kota												

		2 24 02 3.06 0001	Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten/kota	Jumlah perangkat daerah kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan						26	24.000.000	26	24.000.000	26	24.000.000
		2 24 02 3.06 0002	Pengawasan Kearsipan terhadap badan usaha milik daerah di kabupaten/kota	Jumlah badan usaha milik daerah kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan						1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000
		2 24 02 4.04	Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota												
		2 24 02 4.04 0001	Pelaksanaan Bimbingan Teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota	Jumlah Bimbingan Teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota yang dilaksanakan						1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000
		2 24 02 4.04 0002	Pelaksanaan Pembinaan kearsipan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, dan Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi yang dilakukan pembinaan						1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000
		2 24 02 4.06	Pengawasan kearsipan di kabupaten/kota												

		2 24 02 4.06 0001	Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten/kota	Jumlah perangkat daerah kabupaten/kota yang diakukan pengawasan											
		2 24 02 4.06 0002	Pengawasan Kearsipan terhadap badan usahamilik daerah di kabupaten/kota	Jumlah badan usaha milik daerahkabupaten/k ota yang diakukan pengawasan											
		2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				-		50.000.000		65.000.000		63.000.000		116.000.000
		2 24 03 2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/KotayangMemiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun												
		2 24 03 2.01 0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yangMemiliki Retensi Di Bawah10Tahun yang Dimusnahkan	4			1	20.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000
		2 24 03 2.01 0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	JumlahArsipyangDil akukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang MemilikiRetensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1								1	15.000.000	
		2 24 03 2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota												
		2 24 03 2.02 0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, PemulihandanPenyi mpanan Akibat Bencana	2			1	2.000.000					1	15.000.000

		2 24 03 2.02 0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	4			1	4.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000
		2 24 03 2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan												
		2 24 03 2.03 0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	4			1	8.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
		2 24 03 2.03 0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	2			1	8.000.000					1	5.000.000
		2 24 03 2.03 0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	0										
		2 24 03 2.03 0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran	1									1	5.000.000

				Desa/Kelurahan											
		2 24 03 2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota												
		2 24 03 2.04 0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan										1	5.000.000
		2 24 03 2.04 0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip										1	5.000.000
		2 24 03 2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang												
		2 24 03 2.05 0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	4			1	3.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
		2 24 03 2.05 0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	4			1	3.000.000	1	10.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000
		2 24 03 2.05 0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	2			1	2.000.000					1	1.000.000

		2 24 04	PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP				-		4.000.000		4.000.000		4.000.000		6.000.000
		2 24 04 2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota												
		2 24 04 2.01 0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	4			1	2.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000
		2 24 04 2.01 0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	2			1	2.000.000					1	2.000.000
			Jumlah												

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Page 15

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pagu Anggaran tahun 2026

Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pagu Anggaran
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			4.728.308.942
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		81	3.908.668.132
		92	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	10.000.000
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektor	Jumlah Data Statistik Sektor		
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Daerah	Jumlah Data Statistik Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.202.508.942
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	3.104.308.942
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	98.200.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Page 15
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan		
Administrasi Umum Perangkat Daerah			130.219.882
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	8.898.882
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	14.070.860
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	7.185.140
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	4.920.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	95.145.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			340.900.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	154.800.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	186.100.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			225.039.308
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	79.640.213
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	12.000.000
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		

Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1	133.399.095
Penataan Organisasi			
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		80	655.680.000
		7,5	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			628.540.000
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			328.495.600
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan'	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5	64.451.700
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya		
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	5	55.680.000
Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		

Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat		
Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi		
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan		
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1	208.363.900
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK		
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			300.044.400
Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat/ Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya		
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan		
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	3	187.484.813

Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	50	112.559.587
Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			
Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			27.140.000
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			27.140.000
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	1	27.140.000
Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalih mediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan		
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota		
Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			163.960.810
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		50	163.960.810
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			114.391.010

Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	10	67.250.710
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan		
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	30	47.140.300
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis		
Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan		
Penyusunan Database Arsiparis	Jumlah arsiparis		
Pemilihan Arsiparis Teladan	Jumlah Arsiparis yang dipilih dan didukung kegiatannya Arsiparis Teladan		
Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip		
Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan		
Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis		
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			24.277.200
Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI		
Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip		
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	10	24.277.200

Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Jumlah Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan		
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			25.292.600
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	10	25.292.600
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		
Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota			
Pelaksanaan Bimbingan Teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota	Jumlah Bimbingan Teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota yang dilaksanakan		
Pelaksanaan Pembinaan kearsipan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, dan Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi yang dilakukan pembinaan		
Pengawasan kearsipan di kabupaten/kota			
Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten/kota	Jumlah perangkat daerah kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan		
Pengawasan Kearsipan terhadap badan usaha milik daerah di kabupaten/kota	Jumlah badan usaha milik daerah kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan		
Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota			

Pelaksanaan Bimbingan Teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota	Jumlah Bimbingan Teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota yang dilaksanakan		
Pelaksanaan Pembinaan kearsipan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, dan Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi yang dilakukan pembinaan		
Pengawasan kearsipan di kabupaten/kota			
Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten/kota	Jumlah perangkat daerah kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan		
Pengawasan Kearsipan terhadap badan usahamilik daerah di kabupaten/kota	Jumlah badan usaha milik daerahkabupaten/kota yang dilakukan pengawasan		
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/KotayangMemiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yangMemiliki Retensi Di Bawah10Tahun yang Dimusnahkan		
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	JumlahArsipyangDilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang MemilikiRetensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota			
Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, PemulihandanPenyimpanan Akibat Bencana		

Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana		
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan			
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		
Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan		
Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan		
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota			
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan		
Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		
Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang			
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan		

Evaluasi dan Penetapan Hasil AlihMedia yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang		
Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman		
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP			
Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota			
Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan		
Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 merupakan acuan bagi pengembangan dan arah dari seluruh kegiatan perangkat daerah. Dengan Renja ini diharapkan Pimpinan OPD akan menentukan langkah yang berupa kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan sehingga semua kegiatan yang ada di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan akan lebih terarah. Renja ini disusun berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif sebagai bahan acuan dan penilaian serta mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Rencana Kerja ini disusun dengan indikasi penggunaan dana sesuai dengan rencana staregis OPD belum mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga memungkinkan adanya perubahan berkenaan dengan ketersediaan anggaran tahun berkenaan. Demikian penyusunan dokumen perencanaan ini dipergunakan sebagai pedoman operasional untuk menjaga konsistensi, kesinambungan dan sinergi. Untuk mengantisipasi potensi perubahan dan perkembangan yang sangat cepat, tidak menutup kemungkinan adanya penyempurnaan.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas, fungsi, serta program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2027. Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keterpaduan antara kebijakan pembangunan daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah, sehingga arah pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, dan selaras dengan visi, misi, tujuan, serta sasaran pembangunan daerah.

Selain memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2027, dokumen Renja ini juga menggambarkan kebutuhan pendanaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan setiap program dan kegiatan. Dengan demikian, dokumen ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah serta menjadi acuan dalam proses penganggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah ini dilakukan dengan memperhatikan berbagai dokumen perencanaan yang lebih tinggi, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya. Selain itu, penyusunannya juga mempertimbangkan berbagai faktor strategis yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal, seperti dinamika kebijakan pemerintah, kondisi sosial ekonomi masyarakat, perkembangan regulasi, kemampuan fiskal daerah, serta isu-isu strategis yang berkembang dan berpotensi memengaruhi pelaksanaan pembangunan daerah.

Meskipun telah disusun secara sistematis melalui proses perencanaan yang komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, substansi Dokumen Renja ini tetap bersifat dinamis dan dapat mengalami penyesuaian apabila terdapat perubahan kebijakan nasional maupun daerah, perubahan kondisi strategis, keadaan kahar (*force majeure*), maupun hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan yang mengharuskan

adanya penyempurnaan. Setiap perubahan tersebut akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tetap menjamin konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan pembangunan daerah.

Demikian Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2027 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah selama satu tahun anggaran. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 2026

BUPATI PESIR SELATAN



HENDRAJONI